

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

- Kemampuan BPR untuk memperbaiki efisiensi internal, lebih spesifik pada perbaikan efisiensi biaya operasional (BOPO), maka akan berhubungan erat dalam perbaikan kinerja keuangan lembaga (peningkatan ROA dan ROE). Hal ini diperkuat dengan fenomena bahwa tidak terdapat cukup bukti kuat adanya hubungan peningkatan kinerja keuangan dengan jalan mendorong peningkatan pendapatan operasional saja, namun yang paling signifikan adalah pengendalian biaya-biaya. Penurunan rasio kredit bermasalah (NPL) juga memberikan dampak yang kuat dan signifikan dalam perbaikan indikator kinerja keuangan. BPR tidak dapat mencapai kinerja keuangan yang baik melalui peningkatan total asset saja, namun faktor terpenting dalam pengelolaan aset adalah perbaikan di dalam kualitas asset produktif yakni dengan menekan tingkat kredit bermasalah.
- Faktor pemenuhan modal sendiri dari BPR (CAR) memperlihatkan output yang tidak signifikan pengaruhnya terhadap ROA dan ROE, artinya faktor pemenuhan modal sendiri ternyata belum memberikan kontribusi apa-apa terhadap perbaikan kinerja keuangan. Penetapan persyaratan minimum kapital, lebih merupakan persyaratan kehati-hatian (*prudential measure*) yang diterapkan untuk menjaga kemampuan BPR jika terjadi resiko solvabilitas
- Hasil regresi profitabilitas menunjukkan bahwa peningkatan indikator profitabilitas dari BPR (ROA & OSS) ternyata tidak signifikan berhubungan dengan *outreach* dari BPR (baik lebar maupun kedalamannya). Sehingga pencapaian misi komersial (profitabilitas) sebenarnya dapat sejalan dengan pencapaian misi sosial yaitu melayani nasabah miskin, dengan tidak terpengaruhnya kedalaman jangkauan; artinya kinerja yang membaik bisa dicapai tanpa harus mengorbankan jangkauan kredit pada kaum miskin (*outreach*)
- Penelitian ini menemukan fakta bahwa peningkatan jumlah SDM justru berbanding terbalik dengan kinerja profitabilitas (*cost* yang timbul belum

melebihi *benefit* yang dihasilkan), berbeda dengan temuan Cull dkk. Mengindikasikan kurang produktifnya input SDM BPR (strategi BPR terhadap SDM belum merupakan *Cost Effective Strategy*).

- Temuan dari regresi profitabilitas bahwa peningkatan suku bunga kredit bisa meningkatkan kinerja profitabilitas, ketika diuji dengan regresi kualitas aktiva ternyata bahwa faktor suku bunga yang terlalu tinggi juga bisa menyebabkan NPL menjadi naik (terjadi *moral hazard* dan *adverse selection*). Angka koefisien menunjukkan bahwa faktor suku bunga memang memiliki magnitude paling besar terhadap peningkatan NPL.
- Tidak terdapat bukti signifikan bahwa nilai rata-rata kredit berhubungan erat dengan tingkat NPL. Sehingga anggapan kredit bernominal kecil lebih beresiko ternyata tidak terbukti.
- Berkaitan dengan misi menjangkau masyarakat termiskin (*reaching the poorest*), bukti-bukti menunjukkan bahwa semakin besar suatu BPR (dilihat dari asetnya) maka semakin besar pula nilai rata-rata kredit diberikan atau dengan kata lain seiring pertumbuhan volume usahanya, BPR mulai mengalami pergeseran misi (*mission drift*). Sehingga kebijakan pemerintah (Bank Indonesia, seperti tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia), misalnya merger BPR untuk perkuatan modal, efisiensi, dan peningkatan kemampuan kompetisi serta menjangkau banyak nasabah ternyata bisa berimplikasi pada berkurangnya nasabah miskin yang dilayani, atau terjadi *trade off* antara lebar jangkauan (*breadth of outreach*) dengan kedalaman jangkauan (*depth of outreach*)
- Namun diperoleh juga hasil yang signifikan bahwa BPR-BPR yang dimiliki Pemerintah (daerah) serta yang beroperasi di wilayah pedesaan masih mempunyai misi sosial yang kuat (dengan kata lain belum mengalami pergeseran misi).
- Eksplorasi yang dilakukan terhadap suku bunga kredit memperlihatkan bahwa yang paling kuat pengaruhnya (magnitudenya) terhadap bunga kredit adalah faktor biaya tenaga kerja. Hal ini menguatkan fakta bahwa BPR adalah industri keuangan yang bersifat *labor intensive*, namun juga *labor sensitive* dalam *pricing*. Temuan ini juga secara implisit mengkonfirmasi bahwa input

SDM BPR tidak terlalu produktif (produktifitasnya rendah), sebab penambahan 'cost' tenaga kerja langsung tercermin dalam 'harga jual'.

- Disamping faktor biaya-biaya umum, faktor biaya dana (bunga atas dana pihak ketiga) juga sangat signifikan mempengaruhi *pricing* dari BPR. Disini BPR agar mampu menjaring dana masyarakat terpaksa harus mengkompensasi dengan pemberian reward suku bunga tinggi bagi depositan dan investornya (temuan ini merupakan rekonsiliasi dengan regresi profitabilitas, dimana penurunan faktor ini memiliki magnitude terbesar terhadap ROA dan OSS), sehingga secara otomatis komponen ini tercermin dalam bunga kredit.
- Ditemukan juga bukti bahwa tiada perbedaan bunga kredit BPR besar dan BPR kecil. Artinya, bahkan BPR yang memiliki aset banyak pun tidak mampu menurunkan bunga kreditnya. Nampaknya skala ekonomis usaha yang berdampak pada kemampuan menurunkan harga jual belum dapat dicapai industri BPR.
- Dari keseluruhan regresi yang dilakukan diperoleh hasil bahwa metode peminjaman berkelompok tidak memperlihatkan bukti-bukti yang nyata mampu mendorong tingkat profitabilitas lebih tinggi, atau mampu menurunkan resiko kredit (rasio kredit bermasalah), juga tidak signifikan dalam hal nilai nominal rata-rata kredit diberikan serta tidak memiliki pengaruh pada pembentukan suku bunga kredit itu sendiri. Hal ini menguatkan kesimpulan bahwa metode *group lending* memang hanya sarana penyaluran atau akses kredit bagi nasabah kecil yang tidak memiliki harta sebagai agunan (*assetless*) dan dianggap belum memenuhi syarat (*unbankable*).

5.2. Saran-Saran

- Anggapan konvensional bahwa kredit mikro (kredit kepada kaum miskin) itu tidak terlalu menguntungkan dan cenderung beresiko ternyata tidak terbukti. Disini pemerintah harus memandang penting dan perlu memberi perhatian lebih pada industri keuangan mikro di Indonesia, sebab ternyata merupakan salah satu sarana efektif pengurangan kemiskinan. Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, MenegKop & UKM, serta Gubernur Bank Indonesia tahun 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, merupakan salah satu langkah maju para pengambil kebijakan di negeri ini terhadap perkembangan dunia keuangan mikro. Namun kiranya diperlukan kebijakan yang lebih nyata, terpadu dan komprehensif agar sasaran sektoral dapat saling mendukung dan tidak terjadi konflik sasaran. Dalam hal ini pelibatan aktor-aktor lain seperti pelaku industri keuangan mikro secara partisipatif serta dukungan anggota legislatif mutlak juga diperlukan, agar kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya dapat terwujud dalam kerangka peraturan nasional yang lebih kuat, yakni terbitnya undang-undang tentang lembaga keuangan mikro, yang juga mengatur tentang BPR.
- Salah satu temuan dalam penelitian ini yaitu industri BPR dewasa ini rentan mengalami pergeseran misi. Maka perlu untuk terus dikaji kebijakan yang bisa berdampak pada terjadinya gejala pergeseran misi tersebut misalnya kebijakan penggabungan BPR agar lebih besar dan efisien serta kompetitif, namun disisi lain BPR ternyata makin menjauh dari misi pelayanan kepada masyarakat termiskin. Disamping itu tingginya biaya-biaya input menjadikan 'harga jual' kredit BPR menjadi mahal. Salah satu biaya input yang cukup signifikan mempengaruhi adalah biaya dana yang dihimpun (*cost of fund*), disamping faktor biaya SDM yang tidak *cost effective*. BPR agar mampu bersaing mendapatkan dana eksternal maka harus memberikan 'imbal jasa' yang tinggi juga. Disini peran pengambil kebijakan untuk membantu industri BPR agar dapat mengakses dana-dana komersil tapi tidak terlalu tinggi bunganya agar BPR dapat menurunkan tingkat suku bunga kreditnya.

- Terkait pembuatan kebijakan, regulator kiranya perlu untuk melakukan studi yang lebih cermat dan mendalam sebelum membuat kebijakan dan aturan terkait BPR dan LKM jenis lain di Indonesia. Sebab sebagaimana berulang kali dinyatakan keuangan mikro adalah industri yang memiliki multi-dimensi dengan kekhasan dan pertimbangan kearifan lokal yang sangat tinggi. Kebijakan yang bersifat umum/pukul rata (*accross the board*) hanya akan mematikan potensi justru dimiliki oleh LKM dengan konteks lokalnya.
- Bagian kedua dari penelitian ini merupakan pengembangan lebih lanjut atas penelitian yang pernah dilakukan bagi Bank Dunia yang mempelajari hubungan antara kinerja keuangan lembaga keuangan mikro dan dampaknya terhadap misi sosial yang diemban, yakni jangkauan (*outreach*) pelayanan terhadap nasabah miskin. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tujuan penelitian hanya bersifat melihat pola hubungan asosiasi, dan bukan mencari hubungan yang bersifat deterministik atau mencari koefisien dari variabel yang dapat diandalkan (*reliable*).
- Sama dengan penelitian tersebut, sifat dari penelitian ini juga hanya bertujuan melihat hubungan asosiasi antar variabel dan bukan hubungan yang bersifat deterministik. Untuk itu diperlukan lebih banyak lagi penelitian dengan tema sentral yang serupa yakni mempelajari konsep dari jangkauan (*outreach*) dan mengeksplorasi keterkaitan indikator prestasi kinerja lembaga keuangan dengan jangkauannya, utamanya pada lembaga keuangan mikro (LKM). Sehingga di masa depan kehadiran dari institusi keuangan sebagai intermediaries tersebut lebih bisa berdampak nyata pada obyektif yang ingin dicapai, seperti pertumbuhan ekonomi, agen pembangunan, alat pengurangan kemiskinan dsb.
- *Scope* dari penelitian ini hanya mencakup 3 provinsi di tanah air, padahal sebagai mana diketahui bersama LKM hadir di hampir seluruh provinsi di Indonesia meski dengan perkembangan berbeda-beda. Untuk itu penelitian dengan mengambil sampel wilayah/provinsi lain juga perlu untuk dilakukan, untuk memetakan pola industri BPR yang punya kekhasan daerah (*locality*) di masing-masing wilayah. Disamping itu penelitian yang melibatkann unit

observasi LKM jenis lain (LKM non bank) seperti koperasi, BMT, credit union, KSM dll juga kiranya perlu dilakukan.

- Karena keterbatasan metodologis, banyak modifikasi dilakukan dalam penelitian ini. Diantaranya yang terpenting adalah pengambilan observasi yang sebagian besar berasal dari tahun 2006. Kiranya untuk kondisi yang lebih *update*, penelitian dengan horizon waktu lebih terkini juga perlu dipertimbangkan, tentu dengan memasukkan pertimbangan kondisi dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Disamping itu sifat data yang *cross section*, tidak melibatkan pengaruh perubahan waktu, dimana seiring perubahan waktu tentu terjadi perubahan internal pada lembaga disamping perubahan eksternal yaitu lingkungan (*environment*) yang dihadapi industri BPR. Data yang bersifat panel akan lebih bermakna karena menggabungkan data *cross section* dan *time series*, sehingga pola perubahan seiring berjalannya waktu juga masuk dalam kalkulasi.

-----#####-----